

NOTA DINAS
NOMOR 2262 /BBSPJIS/BMN/IX/2023

Yth : Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Dari : Kepala Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara
Golongan I
Tanggal : 29 September 2023

Berdasarkan permohonan penghunian Rumah Negara dari Dra. Hendra Yetty, M.Si, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I sebagai berikut:

No.	Kode Barang	NUP	Alamat	Luas Rumah (m2)
1	2	3	4	5
1	4010201004	1	Jalan Pasigaran No. 76 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung	150

untuk ditempati:

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Gaji Pokok (Rp.)	Sewa per bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Dra. Hendra Yetty, M.Si / 196901031993032002	Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	Pembina Utama Muda/ IV.c	5.266.100	437.333

dengan kelengkapan data dukung sebagai berikut:

1. fotokopi salinan keputusan pengangkatan menduduki jabatan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara;
5. surat pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. perhitungan tarif sewa per bulan dan dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang,



Dra. Hendra Yetty, M.Si

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan;
2. Kepala Biro Umum;
3. Sekretaris BSKJI.



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 844 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN, DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN, DAN PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam ruang 2 (dua) dari jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran Keputusan Menteri ini terhitung sejak saat pelantikan pejabat yang baru dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Memindahkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam ruang 2 (dua) dalam jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam ruang 6 (enam) Lampiran Keputusan Menteri ini terhitung sejak saat pelantikan.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA masing-masing berhak memperoleh tunjangan jabatan struktural berdasarkan eselon sebagaimana tercantum dalam ruang 7 (tujuh) sebesar sebagaimana tercantum dalam ruang 8 (delapan) Lampiran Keputusan Menteri ini setiap bulan dan dibayarkan sejak bulan pelantikan.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA untuk segera melakukan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Perindustrian.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI
DENGAN ASLINYA

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA


YULIA ASTUTI, S.T., M.S.E.
NIP. 197407151998032001

UNTUK SDR. : Dra. Hendra Yetty, M.Si

PETIKAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 844 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN, DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	N A M A	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ESELON	TUNJANGAN JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 s/d 11	d.s.t	-	-	-	-	-	-	-
12	Dra. Hendra Yetty, M.Si	1969010319930 32002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Kementerian Perindustrian	II.a	Rp 3.250.000	-
13 s/d 15	d.s.t	-	-	-	-	-	-	-

UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,

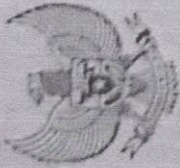


Yulia Astuti, S.T., M.S.E.
NIP. 197407151998032001

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



KARTU KELUARGA

No. 3174082211101030

No.K. 3100 4408581

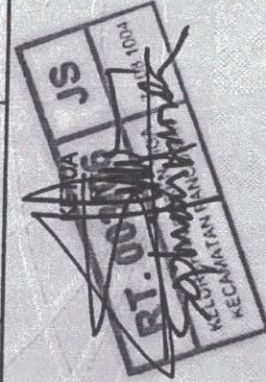
Nama Kepala Keluarga : IRVENDIAZ, SE
Alamat : JL GURU ALIP NO 29
RT/RW : 003/006
Kode Pos : 12760

Desa/Kelurahan : DUREN TIGA
Kecamatan : PANCORAN
Kabupaten/Kota : JAKARTA SELATAN
Provinsi : DKI JAKARTA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	IRVENDIAZ, SE	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	HENDRA YETTY DRA	3275062803650004	LAKI-LAKI	PARUAMAN	28-03-1965	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
3	MUTHARA ADISTY	3174084301691001	PEREMPUAN	PARUAMAN	03-01-1969	ISLAM	STRATA-II	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
4	MUHAMMAD ILHAM ADISTY	3174085703971001	PEREMPUAN	JAKARTA	17-03-1997	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA
5	-	3174080112981001	LAKI-LAKI	JAKARTA	01-12-1996	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
	(9)	(10)	(11)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	(12)	(13)	GUSTIAR NAGUR	SARTINI RIZAL
2	KAWIN	ISTERI	WNI	-	-	HASAN SAZLI	SYAH-ANAR
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	IRVENDIAZ, SE	HENDRA YETTY DRA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	IRVENDIAZ, SE	HENDRA YETTY DRA
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 12-12-2015
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan



KEPALA KELUARGA

IRVENDIAZ, SE

Tanda Tangan/Cap Jempol



KECAMATAN LURAH
ENDANG MULAHATMI, SE
NIP. 195809281989032001

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA SELATAN

NIK : 3174084301691001

Nama	HENDRA YETI KADRA		
Tempat/Tgl Lahir	PARIAMAN, 03-01-1969		
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol. Darah	: A
Alamat	JL GURU ALIP NO 29		
RT/RW	003 / 006		
Kel/Desa	DUREN TIGA		
Kecamatan	PANCORAN		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	03-01-2016		



JAKARTA SELATAN
05-12-2011



Bandung, Februari 2023

Yth. Kuasa Pengguna Barang
pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Selulosa
Jalan Raya Dayeuhkolot No. 132
Bandung 40258 – Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami :

Nama	:	Dra. Hendra Yetty, M. Si
N I P	:	196901031993032002
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan	:	Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
Satuan Kerja	:	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara Golongan I Tipe B yang berlokasi di Jalan Pasigaran No. 76, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan kelengkapan data sebagai berikut :

1. Fotokopi salinan Keputusan Pengangkatan Menduduki Jabatan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Surat Pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara;
5. Surat Pernyataan belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,



Dra. Hendra Yetty, M. Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hendra Yetty, M. Si
N I P : 196901031993032002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa
Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menaati seluruh kewajiban dan larangan Penghunian Rumah Negara, sebagai berikut:

1. Kewajiban penghuni Rumah Negara

- a. menempati Rumah Negara paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak keputusan izin Penghunian diterima;
- b. membayar sewa Rumah Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
- d. membayar pajak, retribusi, dan kewajiban lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara;
- e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
- f. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian penghuni;
- g. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri Sipil tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
- h. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterima keputusan pencabutan izin Penghunian.

2. Larangan penghuni Rumah Negara

- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
- b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
- c. menyerahkan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara kepada pihak lain;
- d. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketertiban umum; dan
- f. menghuni Rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dra. Hendra Yetty, M. Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hendra Yetty, M. Si

N I P : 196901031993032002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c

Jabatan : Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan permohonan Penghunian Rumah Negara.

Bandung, Februari 2023

Pemohon,



Dra. Hendra Yetty, M. Si

PERHITUNGAN USULAN TARIF SEWA RUMAH NEGARA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Lb (m2)	Hs	Ns	Fkb	Fk	% pengali	Sb	NJOP	Lt (m2)	Standar Lt (m2)	Kelebihan Lt (m2)	Toleransi kelebihan Lt (%)	Kelebihan Lt (%)	Kena Biaya Sewa Tambahan	St (Rp)	St bulanan (Rp)	Total Biaya Sewa (Sb + St bulanan) (Rp.)
1	4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	Jalan Pasigaran No.76, Kabupaten Bandung	150	5.890.000	60%	60%	5%	2,75	437.333	335.000	260	350	0	40%	0,00%	TIDAK	0	0	437.333

Rumus : $Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$

Keterangan:

- Sb : Sewa bangunan per bulan
2,75% : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
Lb : Luas bangunan dalam meter persegi (150 M2)
Hs : Harga satuan bangunan per meter persegi (Rp.5.890.000/m2 sesuai Kepgub No.910/Kep.356-BPKAD/2022)
Ns : Nilai sisa bangunan/layak huni (60% (Bangunan layak huni))
Fkb : Faktor Klasifikasi tanah/kelas bumi (60%)
Fk : Faktor keringan sewa untuk PNS (5%)
Lt : Luas Tanah
St : Sewa kelebihan tanah per tahun

Bandung, Juni 2023

Kuasa Pengguna Barang,



Dra. Hendra Yetty, M.Si



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 910/Kep.356-BPKAD/2022
TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan digunakan sebagai pedoman penganggaran berdasarkan kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, disusun standar harga satuan dalam bentuk standar biaya yang meliputi umum dan standar biaya khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6E33C0DE05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode Komponen	Nama Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.3.03.01.02.0013.00044	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Cianjur	M2	5.340.000
1.3.03.01.02.0013.00045	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Cirebon	M2	4.850.820
1.3.03.01.02.0013.00046	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Garut	M2	4.310.000
1.3.03.01.02.0013.00047	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Indramayu	M2	5.610.000
1.3.03.01.02.0013.00048	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Karawang	M2	5.320.000
1.3.03.01.02.0013.00049	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Kuningan	M2	5.330.000
1.3.03.01.02.0013.00050	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Majalengka	M2	4.940.000
1.3.03.01.02.0013.00051	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Pangandaran	M2	4.420.000
1.3.03.01.02.0013.00052	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Purwakarta	M2	5.920.000
1.3.03.01.02.0013.00053	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Subang	M2	5.830.000
1.3.03.01.02.0013.00054	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Sukabumi	M2	5.260.000
1.3.03.01.02.0013.00055	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Sumedang	M2	4.620.000
1.3.03.01.02.0013.00056	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kabupaten Tasikmalaya	M2	4.950.000
1.3.03.01.02.0013.00057	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Bandung	M2	6.090.637
1.3.03.01.02.0013.00058	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Banjar	M2	5.310.000
1.3.03.01.02.0013.00059	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Bekasi	M2	5.590.000
1.3.03.01.02.0013.00060	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Bogor	M2	8.090.000
1.3.03.01.02.0013.00061	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Cimahi	M2	5.860.000
1.3.03.01.02.0013.00062	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Cirebon	M2	6.440.000
1.3.03.01.02.0013.00063	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Depok	M2	4.963.140
1.3.03.01.02.0013.00064	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Sukabumi	M2	5.660.000
1.3.03.01.02.0013.00065	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe A	Lokasi : Kota Tasikmalaya	M2	5.700.000
1.3.03.01.02.0013.00066	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe B	Lokasi : Kabupaten Bandung	M2	5.890.000
1.3.03.01.02.0013.00067	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe B	Lokasi : Kabupaten Bandung Barat	M2	4.430.790
1.3.03.01.02.0013.00068	1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Rumah Dinas Tipe B	Lokasi : Kabupaten Bekasi	M2	5.546.975



6E33C0DE05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023**

AKUN PERKOTAAN

NOP: 31.09.2023.030.212-004447

LETAK OBJEK PAJAK RP PANGAJARAN CITUREUP RT:005 RW:09 KABUPATEN BANDUNG			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK SUYUD LUKAM RP PANGAJARAN CITUREUP RT:005 RW:09 KABUPATEN BANDUNG NPWP:	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	102	073	335.000	60.970.000
BANGUNAN	90	024	700.000	63.000.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				123.970.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				113.970.000
PBB yang Terhutang =				125.367
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				125.367
SERATUS DUA RIBU LIMA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO 29 September 2023			Serang, 21 Februari 2023	
TEMPAT PEMBAYARAN			KEPALA Bidang Pajak II	
BANK bjb, bjb DIGI, ATM bjb Kantor BPP, Indonesia			